

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh *Flypaper Effect* Terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Objek penelitian dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2021-2023. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *sensus sampling* yang telah ditetapkan dengan beberapa kriteria.

Tabel 4.1 Hasil Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung	13
2	Kota yang ada di Provinsi Lampung	2
Jumlah Kabupaten/Kota yang digunakan		15
Jumlah sampel data keseluruhan (15 x 3 tahun)		45

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan periode penelitian 3 tahun, sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 sampel.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui website www.bps.go.id berupa laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah serta website www.djpk.go.id berupa data laporan daftar alokasi dana transfer tahun 2021-2023. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal. Hasil Pengujian statistik deskriptif dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_PAD	45	28360236	694676221	161836000.28	152956457.705
X2_DAU	45	402002138	1319304877	705343237.33	266703079.988
X3_DAK	45	113160901	663054711	284420619.38	123201227.851
X4_DBH	45	11856204	72884715	29075758.38	16046432.482
Y_Belanja Modal	45	92402549	424750976	195321006.87	90629527.182
Valid N (listwise)	45				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25

Berdasarkan Tabel 4.2 nilai N menunjukkan jumlah sampel observasi yang digunakan didalam penelitian ini sebanyak 45 observasi yang diambil dari data laporan publikasi tahunan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang diterbitkan di Badan Pusat Statistik (BPS) dan www.djpk.depkeu.go.id pada tahun 2021-2023. Dilihat dari tabel diatas semua nilai memiliki nilai positif. Berikut rincian data deskriptif yang telah diolah:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai maksimum sebesar 694.676.221 yang terletak pada Kota Bandar Lampung Tahun 2023 dan minimum sebesar 28.360.236 yang terletak pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Mean atau rata-rata variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 161.836.000,28 dan Standar Deviasi sebesar 152.956.457,705.
2. Variabel Dana Alokasi Umum (X2) memiliki nilai maksimum sebesar 1.319.304.877 yang terletak pada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan minimum sebesar 402.002.138 yang terletak pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Mean atau rata-rata variabel Dana Alokasi Umum (X2) sebesar 705.343.237,33 dan Standar Deviasi sebesar 266.703.079,988.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) memiliki nilai maksimum sebesar 663.054.711 yang terletak pada Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 dan minimum sebesar 113.160.901 yang terletak pada Kota Metro Tahun 2023

Mean atau rata-rata variabel Dana Alokasi Khusus (X3) sebesar 284.420.619,38 dan Standar Deviasi sebesar 123.201.227,851.

4. Variabel Dana Bagi Hasil (X4) memiliki nilai maksimum sebesar 72.884.715 yang terletak pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 dan minimum sebesar 11.856.204 yang terletak pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Mean atau rata-rata variabel Dana Bagi Hasil (X4) sebesar 29.075.758,38 dan Standar Deviasi sebesar 16.046.432,482.
5. Variabel Belanja Modal (Y) memiliki nilai maksimum sebesar 424.750.976 yang terletak pada Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dan minimum sebesar 92.402.549 yang terletak pada Kota Metro Tahun 2022 Mean atau rata-rata variabel Belanja Modal (Y) sebesar 195.321.006,87 dan Standar Deviasi sebesar 90.629.527,182.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan agar model yang digunakan untuk bahan penelitian sudah memenuhi asumsi dasar dalam menganalisis regresi yang didalamnya terdapat uji sebagai berikut:

4.3.1 Uji Normalitas

Ghozali (2018) menyatakan uji asumsi klasik digunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dari regresi, apakah terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Klomogrov Smirnov*. Dengan kriteria nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	54794365.04068922
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.103
	Negative	-.067
Test Statistic		.103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25

Pada tabel 4.3 menunjukkan hasil dari uji normalitas menggunakan uji *one sample klmogrov smirnov* dengan jumlah sampel sebanyak 45 sampel. Hasil uji normalitas pada tabel di atas diperoleh nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan yaitu sebesar 0,05 atau $0,200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018) menyatakan uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antar sesama variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat adanya korelasi diantara variabel independe dan besarnya tingkat kolinearitas yang masih dapat di rolerir, yaitu *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 . Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	33814509.792	25878844.661		1.307	.199		
X1_PAD	.260	.072	.439	3.623	.001	.624	1.604
X2_DAU	.047	.042	.140	1.127	.267	.590	1.695
X3_DAK	.327	.099	.444	3.291	.002	.502	1.994
X4_DBH	-.162	.744	-.029	-.218	.828	.526	1.901

a. Dependent Variable: Y_Belanja Modal

Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa perhitungan VIF menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil masing-masing memiliki nilai VIF PAD sebesar 1,604, DAU sebesar 1,695, DAK sebesar 1,994, dan DBH sebesar 1,901 atau < 10 dan tolerance PAD sebesar 0,624, DAU sebesar 0,590, DAK sebesar 0,502, dan DBH sebesar 0,526 atau $> 0,10$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel atau tidak terjadi multikolinieritas variabel independen dalam model regresi.

4.3.3 Uji Autokorelasi (Metode Cochrane Orcut)

Ghozali (2018) menyatakan uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dalam analisis regresi. Metode pengujian ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW-Test) sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi (Metode Cochrane Orcut)

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 ^a	.660	.625	56537556.54220	1.885

a. Predictors: (Constant), Lag_X4, Lag_X2, Lag_X1, Lag_X3

b. Dependent Variable: Lag_Y

Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25

Pada tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai DW-Test sebesar 1,885. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan derajat keyakinan 95% dan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dengan jumlah sampel sebanyak 45 sampel, serta jumlah variabel independen sebanyak 4 variabel maka $k-1 = 4-1 = 3$. Pada tabel Durbin Watson akan didapat nilai dL sebesar 1,383 dan dU sebesar 1,666 dan $4-dU$ ($4 - 1,666 = 2,334$). Sesuai ketentuan Uji Durbin Watson maka diperoleh : $dU < DW < 4 - dU$ atau $1,666 < 1,885 < 2,334$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif pada model regresi tersebut.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018) menyatakan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan residual dari satu periode ke periode lain. Apabila suatu penelitian tidak ada heteroskedastisitas atau homoskedastisitas di suatu model regresi dapat dikatakan model regresi penelitian tersebut baik. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikan $> 0,05$.

Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	33542485.431	14082908.544		2.382
	X1_PAD	.009	.039	.046	.237
	X2_DAU	.020	.023	.180	.894
	X3_DAK	-.032	.054	-.129	-.592
	X4_DBH	.193	.405	.101	.475

a. Dependent Variable: Ares

Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dengan diperoleh hasil bahwa nilai signifikan dari variabel independen Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,814 > 0,05$, Dana Alokasi Umum sebesar $0,376 > 0,05$, Dana Alokasi Khusus sebesar $0,557 > 0,05$, dan Dana Bagi Hasil sebesar $0,637 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memenuhi syarat terhindar dari heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.5 Uji Analisis Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, maka analisis regresi linear berganda dapat dilakukan dalam penelitian ini. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui koefisien-koefisien regresi serta signifikan sehingga dapat digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Adapun hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	33814509.792	25878844.661		1.307
	X1_PAD	.260	.072	.439	3.623
	X2_DAU	.047	.042	.140	1.127
	X3_DAK	.327	.099	.444	3.291
	X4_DBH	-.162	.744	-.029	-.218

a. Dependent Variable: Y_Belanja Modal

Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25

Dari hasil analisis regresi di atas, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + \varepsilon$$

$$BM = \alpha + 0,260 PAD + 0,047 DAU + 0,327 DAK - 0,162 DBH + \varepsilon$$

Berikut rincian hasil dari persamaan diatas yaitu:

1. Nilai koefisien regresi variabel Belanja Modal (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 33.814.509,792 untuk 1 satuan apabila semua variabel bersifat konstan.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Modal sebesar 0,260 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan X1 sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan (+) Belanja Modal sebesar 0,260.
3. Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja Modal sebesar 0,047 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan X1 sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan (+) Belanja Modal sebesar 0,047.
4. Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Belanja Modal sebesar 0,327 nilai ini menunjukkan bahwa setiap

penurunan/peningkatan X1 sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan (+) Belanja Modal sebesar 0,327.

5. Nilai koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (X4) terhadap Belanja Modal sebesar -0,162 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan X1 sebesar 1 satuan diprediksi akan meningkatkan (+) Belanja Modal sebesar - 0,162.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2018) menyatakan uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan satu (1). Apabila nilai R^2 kecil, itu artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Namun jika nilai R^2 mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.797 ^a	.634	.598	57468814.885

a. Predictors: (Constant), X4_DBH, X2_DAU, X1_PAD, X3_DAK

Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25

Pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa besarnya nilai R Square untuk variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil diperoleh sebesar 0,634%. Hal ini berarti bahwa 63,4% dari Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 36,6% dijelaskan oleh variabel lain.

4.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model atau uji f diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak digunakan. Dalam hal ini layak (andal) menjelaskan terkait model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil dari uji f dengan SPSS versi 25:

Tabel 4. 9 Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2292967053059266 88.000	4	573241763264816 72.000	17.357	.000 ^b
Residual	1321065873693415 36.000	40	330266468423353 8.500		
Total	3614032926752682 20.000	44			

a. Dependent Variable: Y_Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), X4_DBH, X2_DAU, X1_PAD, X3_DAK

Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25

Berdasarkan hasil Uji f pada tabel 4.9 diperoleh Fhitung sebesar 17,357 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Sedangkan Ftabel diperoleh melalui tabel F sehingga df (N1) = k-1 = 4-1= 3 (pembilang) dan df (N2) = n – k = 45-4 = 41 (penyebut), maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,83. Artinya Fhitung > Ftabel (17,357 > 2,83) dan tingkat signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). Maka dapat dikatakan bahwa variabel independen dari Belanja Modal yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan model layak digunakan dalam penelitian ini.

4.4.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Ghozali (2018) menyatakan bahwa Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan tingkat signifikan 0,05. apabila nilai signifikan t < 0,05 maka

terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Tetapi apabila nilai signifikan $t > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat dalam tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4. 10 Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	33814509.792	25878844.661		1.307
	X1_PAD	.260	.072	.439	3.623
	X2_DAU	.047	.042	.140	1.127
	X3_DAK	.327	.099	.444	3.291
	X4_DBH	-.162	.744	-.029	-.218
					Sig.

a. Dependent Variable: Y_Belanja Modal

Sumber : Hasil Olah Data SPSS ver 25

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel diatas, terdapat t hitung untuk setiap variabel sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel T ($\alpha = 5\%$ atau 0,05)

1. Hasil untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,001 < 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu Ha1 diterima dan menolak Ho1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
2. Hasil untuk variabel Dana Alokasi Umum (X2) menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,267 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu Ha2 ditolak dan menerima Ho2 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
3. Hasil untuk variabel Dana Alokasi Khusus (X3) menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,002 < 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu Ha3 diterima dan menolak Ho3 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.
4. Hasil untuk variabel Dana Bagi Hasil (X4) menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,828 > 0,05$ maka jawaban hipotesis yaitu Ha4 ditolak dan

menerima Ho4 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (Ha1) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berkontribusi terhadap penambahan Belanja Modal. Dengan demikian, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai belanja modal, yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan infrastruktur di wilayah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, peningkatan PAD dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah. Kontribusi PAD yang optimal akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan tanpa bergantung dengan transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini juga menunjukkan bahwa *flypaper effect* tidak terjadi, karena pengaruh signifikan PAD terhadap belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih mengandalkan sumber pendapatan asli dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah berupaya melakukan berbagai hal untuk memaksimalkan potensi lokal, seperti mengembangkan pariwisata, perdagangan, dan pertanian. Pengaruh positif PAD terhadap Belanja Modal juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan

keuangan daerah. Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Alokasi belanja modal yang efektif diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Meskipun demikian, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Optimalisasi potensi PAD juga harus didukung dengan inovasi kebijakan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian, Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat memanfaatkan PAD secara maksimal untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sema & Riduwan (2021), Romadhon & Aji (2021), dan Anggraeni & Sapari (2023), yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat membantu alokasi belanja modal, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik.

4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H_{a2}) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah DAU yang diterima oleh daerah tidak secara otomatis meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja modal, khususnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap.

DAU merupakan salah satu bentuk dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah serta mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa DAU digunakan untuk mendanai kebutuhan umum daerah dan mendorong pemerataan layanan publik. Namun dalam praktiknya, struktur belanja daerah menunjukkan bahwa sebagian besar DAU digunakan untuk membiayai belanja operasional, seperti gaji pegawai dan kebutuhan rutin pemerintahan. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam memprioritaskan belanja modal yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan aset jangka panjang.

Kecenderungan ini diperkuat oleh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana pemerintah daerah diwajibkan untuk memprioritaskan belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan penggajian pegawai. Akibatnya, ruang fiskal yang tersedia untuk belanja modal menjadi sangat terbatas. Ketergantungan pada DAU untuk mendanai belanja operasional juga menciptakan tekanan anggaran, yang berdampak pada minimnya alokasi belanja yang bersifat produktif.

Fokus penggunaan DAU di sebagian besar kabupaten/kota di Lampung, lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan operasional pemerintahan. Belanja pegawai mengambil porsi terbesar dari DAU, sehingga ruang untuk mengalokasikan dana tersebut ke sektor belanja modal menjadi sangat terbatas. Karena keterbatasan ini, kontribusi DAU terhadap pengembangan infrastruktur publik dan investasi produktif di daerah sangat rendah.

Belanja Modal memerlukan pengalokasian dana yang strategis dan fleksibel, sedangkan DAU dirancang untuk kebutuhan umum yang kurang spesifik. Oleh karena itu, meskipun DAU memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga

keberlanjutan operasional pemerintah daerah, kontribusinya terhadap Belanja Modal relatif kecil. Ketergantungan pemerintah daerah pada DAU untuk membiayai belanja operasional semakin memperkecil kemungkinan penggunaan dana tersebut untuk tujuan pembangunan.

Situasi ini menunjukkan perlunya strategi pendanaan alternatif untuk meningkatkan Belanja Modal di kabupaten/kota di Lampung. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi strategi yang relevan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada DAU dan lebih fokus pada belanja yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Junaedi & Masdjojo (2022), Hidayati *et al.*, (2022), Sania *et al.*, (2024), dan Khulwani *et al.*, (2022) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi DAU cenderung lebih difokuskan pada belanja operasional, seperti pembayaran gaji pegawai dan pengeluaran rutin lainnya, sehingga tidak secara langsung mendukung peningkatan Belanja Modal, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi *Flypaper Effect*, di mana dana DAU lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dibandingkan dengan belanja modal yang mendukung pembangunan daerah.

4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (Ha3) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DAK mampu mendorong realisasi belanja modal, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana-prasarana pelayanan publik.

DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi daerah guna membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa DAK diarahkan untuk mendukung prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, dan memperkecil kesenjangan layanan publik antardaerah. Dengan peningkatan alokasi DAK memungkinkan pemerintah daerah untuk merealisasikan belanja modal yang fokus pada pengadaan sarana dan prasarana fisik. Dalam hal ini, DAK berperan strategis dalam mengatasi kendala pembangunan di daerah, dan mempercepat pemerataan fasilitas publik yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Lampung.

Penggunaan DAK terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan infrastruktur daerah, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah melalui pendanaan yang terarah. Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang menerima alokasi DAK lebih besar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam merealisasikan prioritas proyek pembangunan. Realisasi tersebut dapat mendukung daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dana Alokasi Khusus tidak hanya mendukung kebutuhan infrastruktur, tetapi juga mendanai pelaksanaan program nasional yang sesuai dengan kebutuhan khusus di daerah. Sesuai dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk memenuhi pembiayaan fasilitas publik di wilayah-wilayah tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa DAK tidak hanya menutup kekurangan anggaran pemerintah daerah, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Peningkatan nilai DAK yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung menunjukkan hubungan yang erat dengan peningkatan belanja modal. Efektivitas penggunaan DAK sangat bergantung pada perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik oleh pemerintah daerah. Sehingga optimalisasi pemanfaatan DAK diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sema & Riduwan (2021), Priyono & Khotimah (2023) dan Romadhon & Aji (2021), yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peningkatan alokasi DAK terbukti mendorong pembangunan infrastruktur, memperbaiki layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang tepat menjadi kunci agar DAK digunakan secara efektif, serta memberikan kontribusi penting bagi pembangunan daerah, khususnya kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana DAK dalam membiayai belanja modal menunjukkan bahwa *Flypaper Effect* masih terjadi, karena pemerintah daerah belum sepenuhnya mandiri dalam mengalokasikan sumber pendanaannya.

4.5.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H_{a4}) ditolak. Meskipun DBH merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, alokasinya cenderung tidak digunakan untuk belanja modal, tetapi lebih diarahkan pada kebutuhan lain yang bersifat prioritas daerah, seperti mendukung pengelolaan sumber daya yang telah ada. Hal ini menunjukkan bahwa besaran DBH yang diterima tidak cukup besar untuk mendorong pembangunan infrastruktur secara efektif.

Dana Bagi Hasil diharapkan dapat memperkuat keuangan daerah melalui pembagian hasil dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. Hal ini tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa DBH merupakan bagian dari dana transfer yang diberikan kepada daerah berdasarkan proporsi penerimaan nasional. Namun, tidak terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut yang mewajibkan penggunaan DBH untuk belanja modal. Sebaliknya, daerah diberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan DBH sesuai kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing.

Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan fleksibilitas dalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, jumlah DBH yang diterima oleh kabupaten/kota di Provinsi Lampung relatif kecil, sehingga dana ini biasanya digunakan untuk kegiatan yang tidak memerlukan biaya besar. Akibatnya, kontribusinya terhadap belanja modal menjadi terbatas. Meskipun DBH dapat membantu pembiayaan daerah, dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur atau proyek besar sangat bergantung pada jumlah dana yang diterima dan bagaimana dana tersebut diprioritaskan.

Penerimaan DBH yang berasal dari pendapatan pajak dan pengelolaan sumber daya alam memiliki keterbatasan karena tidak semua daerah di Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Ketergantungan pada penerimaan pajak daerah membuat DBH lebih baik digunakan untuk mendukung pelayanan dasar atau kegiatan operasional lainnya daripada untuk belanja modal. Dengan demikian, DBH tidak memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur secara langsung.

Peningkatan dampak DBH terhadap belanja modal diperlukan strategi yang tepat dalam perencanaan anggaran di tingkat daerah. Pengelolaan DBH dapat diarahkan untuk proyek-proyek kecil yang mendukung infrastruktur, sementara proyek berskala besar dapat didanai oleh sumber lain seperti DAK. Dengan

pengelolaan yang lebih terarah. Sehingga, kontribusi DBH terhadap pembangunan daerah di masa depan dapat lebih ditingkatkan kembali.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Zulkarnain & Haryati (2023), Syukri *et al.*, (2022), dan Eliana *et al.*, (2023) yang menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah DBH yang kecil cenderung digunakan untuk kebutuhan operasional, sehingga kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadi terbatas. Untuk memberikan dampak yang lebih besar pada pembangunan daerah, pengelolaan DBH harus dioptimalkan. Kondisi ini juga mencerminkan adanya *Flypaper Effect*, karena dana DBH lebih banyak digunakan untuk belanja rutin daripada untuk belanja modal yang mendukung pembangunan jangka panjang.